



Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam

Samsul*, Najamuddin Mara Hamid, Hotman Guba Nasution

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

* E-mail: syams.sak@gmail.com

Abstract

This study discusses how the distribution system in Islamic economics, using qualitative methods, is presented in descriptive form from the results of literature studies (literature studies) written literature. Islamic economics as a financial system has special ways and strategies supported by economies that are far different from other economic systems. Islamic economics lends money and finances compensation. However, to achieve socioeconomic justice norms, it is necessary to overcome the price problem, through a strategy of moral improvement, income distribution and equal wealth, as well as to saving usury.

Keywords: Control; Inflation; Islamic Economy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam, dengan menggunakan metode kualitatif, disajikan dalam bentuk deskriptif dari hasil studi kepustakaan (library research) literatur-literatur tertulis. Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian mempunyai cara dan strategi tersendiri dalam menekan inflasi yang jauh berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam menyetujui kebijakan moneter dan fiskal sebagai bagian dan upaya menekan inflasi. Akan tetapi untuk mencapai norma keadilan sosioekonomi perlu ada upaya untuk menjaga stabilitas harga, melalui strategi perbaikan moral, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta penghapusan riba.

Kata Kunci: Pengendalian; Inflasi; Ekonomi Islam

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu negara umumnya bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi yang di tandai dengan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) berarti semakin sedikit kapasitas pengangguran faktor produksi yang ada dalam perekonomian tersebut. Namun demikian, adakalanya penggunaan faktor produksi dalam perekonomian tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ekonomi yang lain yaitu inflasi. Suatu negara yang membuka kran perdagangan dengan negara lain juga kerap menghadapi masalah ketimpangan dalam neraca pembayaran dimana lebih banyak aliran uang yang keluar dari pada yang masuk.¹

¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000), hal. 4

Masalah dalam ekonomi makro dapat dikelompokkan menjadi masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Masalah jangka pendek berkaitan dengan stabilisasi, yaitu bagaimana agar dalam jangka pendek dapat terhindar dari masalah-masalah seperti inflasi, pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran. Sementara masalah jangka panjang berkaitan mengenai bagaimana negara dapat menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi.²

Stabilitas ekonomi diperlukan agar dapat menjaga pendapatan masyarakat tersebut tidak tergerus oleh kenaikan harga (inflasi). Dengan begitu masyarakat akan menjadi lebih makmur.³ Inflasi dari waktu ke waktu dapat menggrogoti nilai uang yang dimiliki masyarakat. Semakin naiknya harga secara agregat maka hal tersebut akan menurunkan nilai uang riil dalam suatu perekonomian. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat bersangkutan. Stabilitas harga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi riil suatu negara.

Inflasi merupakan suatu isu yang menarik untuk di kaji dalam sejarah panjang ekonomi dunia, berbagai studi dan riset dilakukan untuk mengungkap apa sebenarnya di balik fenomena ekonomi yang satu ini, dan bagaimana pula cara menanggulangnya. Berbagai teori telah berkembang namun hingga saat ini belum ada teori yang benar-benar komprehensif untuk menginterpretasikan secara jelas dan tepat, serta memberikan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari masalah inflasi. Bahkan ketidakmampuan ini telah diakui oleh pakar-pakar ekonom barat sendiri. Profesor Moris Bih mengatakan bahwa problem terbesar yang dihadapi oleh perekonomian pasar barat yang tidak terselesaikan hingga sekarang adalah pergolakan dan perubahan-perubahan nilai harga asli mata uang.⁴

Fenomena inflasi merupakan obyek kajian yang menarik. Berbagai perdebatan atau forum diskusi di belahan dunia baik nasional, regional, maupun internasional terutama yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) tak henti-hentinya memperbincangkan inflasi dalam berbagai forum. Inflasi di negara-negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun diantaranya bersumber pada impor besar-besaran bahan bagi industri yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Rumor politik juga tidak ketinggalan memicu meningkatnya inflasi. Belum lagi pola konsumernya masyarakat terutama pada barang-barang konsumsi akibat keterbukaan ekonomi membuat semakin parahnya kinerja perekonomian negara yang digerogoti inflasi.⁵

Inflasi sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu, semenjak perekonomian menerapkan standar *fiat*, dalam arti bahwa negara memberikan kewenangan kepada bank sentral untuk menerbitkan dan mengedarkan uang tersebut atas dasar kepercayaan, telah disadari bahwa jumlah uang yang berlebihan yang melebihi uang yang dibutuhkan masyarakat maka akan dapat menimbulkan

² Budiono, *Ekonomi Internasional*. BPFE, (Yogyakarta: BPFE, 1994), hal.1

³ *Ibid*

⁴ Aam Slamet Rusydiana, *Jurnal Kordinat*, vol 11 No.1, Jakarta: 2009

⁵ Khalwaty Tajul, *Inflasi dan Solusinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000)

masalah dalam perekonomian berupa kenaikan harga-harga agregat (menyeluruh) yang biasa dikenal dengan inflasi.⁶

Salah satu dampak yang dirasakan dari adanya inflasi adalah merosotnya nilai uang yang secara riil dipegang masyarakat. Pendapatan masyarakat yang jumlahnya tetap yang tidak dapat mengikuti kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat tersebut menurun. Inflasi juga menurunkan daya beli, terutama bagi masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan tetap atau rendah. Inflasi juga dapat menurunkan minat masyarakat untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Inflasi juga dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Kreditur atau pihak yang meminjamkan uang juga akan terkena imbas inflasi karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi sehingga dapat menghambat investasi produktif yang dilakukan produsen, sehingga produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu, bahkan bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, bisa gulung tikar.

Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin tidak baik atau semakin memburuk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi akan cenderung menjadi bertambah cepat apabila tidak segera diatasi. Inflasi yang bertambah serius cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif. Mengurangi ekspor, dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁷

Laju inflasi sebesar nol persen pada umumnya sulit dicapai karena banyak faktor yang mempengaruhi inflasi itu sendiri. Laju inflasi suatu negara biasanya ditarget pada tingkat yang rendah atau dibawah dua digit, karena laju inflasi yang rendah diyakini bisa menggairahkan perekonomian. Inflasi yang rendah dapat mendorong konsumen untuk membeli barang dan jasa. Jika konsumen menunda pembelian, konsumen kelak akan membayar lebih untuk barang dan jasa yang sama. Kenaikan harga yang tidak secepatnya di ikuti kenaikan upah juga akan menyebabkan keuntungan yang diterima pengusaha bertambah, sehingga dapat menggalakkan investasi dimasa mendatang. Inflasi yang rendah juga membuat orang berselera untuk meminjam uang, selama tingkat bunga juga rendah mempertahankan inflasi yang rendah adalah tujuan penting pemerintah dan bank sentral di banyak negara.

Sementara dalam Islam secara alami sistem tidak akan memiliki kecenderungan seperti konvensional, sistem Islam tidak memperkenankan praktek-praktek spekulasi dan menganjurkan perilaku konsumsi yang hemat. Islam tidak memperkenankan bunga eksis di pasar, dengan demikian tidak ada kecenderungan *money creation* melalui sektor perbankan yang kemudian menggelembungkan jumlah uang, dimana semakin memperlebar ketimpangan sektor moneter dan riil. Disamping itu absensi bunga dalam ekonomi bermakna

⁶Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hal. 10

⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 16

pula tidak ada faktor yang menggoda para pemegang dana untuk menahan uang mereka di pasar keuangan, dimana semakin berkembang pasar keuangan semakin besar pula uang yang tertahan dan ini pun bermuara pada semakin dalamnya jurang perbedaan antara sektor moneter dan riil. Sehingga, melihat dasar filosofi ini, fokus pada *money supply* untuk menentukan kebijakan moneter beserta instrumennya berupa tingkat bunga tertentu menjadi tidak relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal, surat kabar dan lain-lain. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, dilakukan teknik-teknik tertentu, diantaranya yang paling utama adalah *research* yakni pengumpulan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*librari research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui kepustakaan.⁸

Untuk memenuhi data seperti yang disinggung diatas maka diperlukan sumber data primer dan skunder

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku serta jurnal ekonomi yang berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber utama.

b. Data skunder

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab serta data-data dari *website* atau media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan (penelitian) sebagai data pendukung

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.⁹ Yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan karya yang telah teruji kebenarannya.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁰ Sebagai pendekatannya

⁸ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.5, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1991), h. 24

⁹ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, taranskrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek*, Cet.12, (Jakarta: PT. Rineka Cipta., 2008), h206

¹⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.134

digunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang.¹¹ maksudnya yaitu, deskriptif berarti menggambarkan, analisis berarti menguraikan. Jadi pengertian deskriptif analisis dalam penelitian ini yaitu menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh tentang sistem pengendalian inflasi dalam sistem ekonomi Islam.

3. Analisis dan Pembahasan

Ekonom Islam maupun konvensional banyak yang menyetujui bahwa upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam tingkat moderat, kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) merupakan bagian dan upaya menekan inflasi. Apabila inflasi di defenisikan dengan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum, maka akan kita dapati bahwa dalam setiap perekonomian (apakah itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis ataupun Islam) akan senantiasa ditemui permasalahan inflasi.¹² Hanya saja, perbedaan yang cukup signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara permasalahan inflasi yang ada didalam perekonomian Islam dengan yang ada di dalam perekonomian kapitalis.

Kebijakan fiskal menjadi perangkat penting bagi negara sejahtera,¹³ kebijakan ini mencakup pengeluaran untuk kepentingan umum, pajak progresif dan pinjaman untuk merealisasikan tujuan yang di cita-citakan. Pengeluaran umum bukan hanya untuk fungsi tradisional sebagaimana yang telah diakui, tetapi juga untuk fungsi negara sejahtera dalam meningkatkan pertumbuhan, stabilitas ekonomi dan persamaan pendapatan yang lebih besar.

Kesejahteraan manusia hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spritual manusia.¹⁴ Pendapat ini sesuai dengan pendapat MA. Mannan yang berpendapat bahwa prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama.¹⁵ yang dimaksud nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau lebih dikenal dengan sandang, pangan, papan. Yang dimaksud nilai spritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spritual dibagi lagi menjadi religi (agama), nilai estetika (keindahan, seni), nilai etika (moral) dan nilai logika (kebenaran). Dengan demikian Chapra dan Mannan menghendaki kebijakan fiskal dalam rangka menekan inflasi tidak hanya meletakkan orientasi material akan tetapi perlu meletakkan nilai-nilai spritual. Dalam pemikiran Chapra dan Mannan selama ini ekonomi konvensional dalam

¹¹ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.15

¹² <http://www.jurnal-ekonomi.org/2008/06/16/telaah-singkat-pengendalian-inflasi-dalam-perspektif-kebijakan-moneter-Islam/>

¹³ Umer Chapra, *Sistem moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

¹⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.16

¹⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.230

menekan inflasi melalui kebijakan fiskal hanya mengejar yang bersifat material, kebijakan hanya diarahkan untuk mensejahterakan kebutuhan material seperti sandang, pangan dan papan. Kebijakan material ini hanya dapat memenuhi kebutuhan primer, skunder dan tersier, akan tetapi bersamaan dengan itu dimensi spritual tertinggal jauh. Hal itu dibuktikan dengan dekadensi moral para pejabat, meningkatnya korupsi, kebocoran APBN, dunia ekonomi yang saling menjatuhkan, kapitalisme yang makin kuat dan kemiskinan yang tidak teratasi.

Masyarakat dalam menjalankan roda ekonomi sudah meninggalkan aspek tolong menolong, ketulusan dan masalah akhirat sudah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan. Jadi tertinggalnya aspek spritual mengakibatkan kebijakan fiskal menjadi tidak menyentuh masalah batiniah manusia sehingga kebijakan fiskal dalam menekan inflasi menjadi kebijakan yang kering. Hal itu dibuktikan dengan belum dimasukkannya zakat, infak, shadaqah, wakaf sebagai bagian dari pendapatan belanja negara.

Tidak seperti kebijakan fiskal konvensional, dimana suatu pemerintahan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui insentif dan tarif pajak maupun besarnya *tax base* (dasar pajak) dari suatu kegiatan perekonomian maka ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh karena itu kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan.

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzakki*). Pengumpulan dan penyaluran, dan potensi zakat (termasuk infak dan sedekah) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multi dimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam. Memang kenyataannya zakat sebagai teori sudah banyak di eksplorasi para ahli intelektual Muslim yang concern kepada pembangunan dan keuangan publik.

Mencermat uraian diatas dan kembali kepada pendapat Chapra bahwa Chapra menghendaki kebijakan fiskal sebagai upaya menekan inflasi atau stabilitas harga berorientasi material dan spritual secara seimbang dan utuh. Selain itu agar zakat dan wakaf diperhitungkan sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Bahkan meniscayakan bahwa zakat juga mampu menciptakan stabilitas dalam rangka menekan inflasi. Pendapat diatas memiliki kesamaan walaupun berbeda dalam aspek skala prioritas. Misalnya tokoh Islam Yusuf Qardhawi terkait dengan kebijakan fiskal menegaskan dalam bukunya: *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*.

“ada berbagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui bekerja, jaminan sanak famili yang berkelapangan kepada anggota keluarga lain, zakat, baitul maal dengan segala sumbernya, berbagai kewajiban diluar zakat, sedekah suka rela dan kemurahan hati individu”¹⁶

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1995), h.

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim

Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah.

Selain dari kebijakan fiskal dalam menekan inflasi kebijakan moneter (uang) memiliki peranan besar dalam berbagai kegiatan ekonomi dimana peranan tersebut kembali kepada beberapa sebab berikut¹⁷: (a) pelayanan besar yang diberikan oleh uang bagi kehidupan perekonomian, karena uang merupakan alat barter, tolok ukur nilai, sarana perlindungan kekayaan dan alat pembayaran hutang dan alat pembayaran tunai, (b) hubungan yang kuat antara uang dan berbagai kegiatan ekonomi yang lain, dan pengaruh yang saling berkaitan diantaranya sebab kekuatan uang bersandar pada kekuatan ekonomi, dan ekonomi yang kuat bersandar pada uang yang kuat, dan sebaliknya, (c) munculnya pengaruh uang dalam kehidupan perekonomian dengan bentuk yang sangat besar pada era sekarang yang menyaksikan krisis moneter yang tajam sejak abad ke 18 M, (d) uang merupakan salah satu faktor kekuasaan dan kemandirian ekonomi. Karena itu uang merupakan salah satu faktor kekuasaan dan kemandirian ekonomi. Karena itu uang merupakan salah satu bidikan penting dalam perang ekonomi antar negara.

Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya berfungsi sebagai satuan nilai atau alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas (*commodity*). Uang dapat diperjual belikan dengan kelebihan baik *on the spot* (tunai) maupun secara tangguh. Dalam perspektif ini uang dapat disewakan (*leasing*). Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut Pasar Uang.

Menurut Karim¹⁸ saat ini pasar uang telah berkembang cepat sehingga terlepas dari barang dan jasa. Hanya 5% dari transaksi di pasar uang yang terkait dengan pasar barang dan jasa. Celakanya lagi hanya 45% dari transaksi yang uang yang *spot*, selebihnya adalah *forward*, *futures* dan *options*.

Menurut data dari NGO asal Amerika Serikat¹⁹ volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation* dan *derivative market*) dunia berjumlah Us \$ 1,5 triliun perhari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam perdagangan dunia di sektor riil US \$ 6 triliun setiap tahun. Itu artinya dengan empat hari transaksi di pasar uang, nilainya sudah menyamai transaksi di sektor riil selama setahun. Inilah

¹⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa), h.325-326

¹⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 2006)

¹⁹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2006)

yang kemudian menciptakan suatu kondisi perekonomian gelembung (*buble economic*), suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang besar sekali, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara.

Kondisi yang tidak seimbang tersebut jelas merupakan kegagalan yang nyata sistem perekonomian kapitalis. George Soros seperti yang dikutip Karim²⁰ di depan kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa sistem kapitalis global sudah tidak berjaya lagi. Selain itu, karena peredaran modal yang sebebas-bebasnya, perekonomian suatu negara satu demi satu akan rusak dan kredit macet menjadi gejala global.

Krisis ekonomi yang melanda dunia sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama. *Pertama*, persoalan mata uang, yakni nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terkait kepada mata uang negara lain (misalnya Rupiah terhadap US Dollar), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil, dan bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. *Kedua*, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman dan penyimpanan uang²¹

Apalagi setelah diterapkannya manajemen moneter melalui suku bunga, dua fenomena utama terjadi, yaitu tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar. Sedangkan penerapan sistem *gold coin* atau *billion standar* dan *gold exchange* standar sulit untuk diterapkan kembali, terutama disebabkan ketergantungan sistem ini pada produksi dan penemuan-penemuan tambang emas yang sulit untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan perdagangan²²

Kesalahan pandangan terhadap uang yang tidak hanya sebagai alat ukur tetapi juga sebagai komoditi, serta pembuatan mata uang yang tidak menggunakan basis emas atau perak sehingga nilai nominalnya tidak menyatu dengan nilai intristiknya, inilah yang menjadi biang dari segala keruahan ekonomi kapitalis, termasuk selama ini yang di praktekkan di Indonesia.²³ Dengan mengganti emas dengan uang kertas, dapat menciptakan bibit-bibit inflasi.²⁴

Secara makro, sesungguhnya sebuah tata-tatanan masyarakat yang ditopang dengan sistem ribawi tidak akan pernah betul-betul sehat. Kalaupun suatu ketika tampak sehat, ia sesungguhnya sedang menuju ke satu titik kolaps setelah mencapai puncaknya dari sebuah siklus krisis ekonomi yang dialami terus menerus selama beberapa tahun akan berbalik dan terhenti.²⁵

Mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang paling penting adalah meluruskan pandangan yang

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *op. cit*

²¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op. Cit, h. 104*

²² *Ibid* h. 104

²³ *Ibid, h.11-12*

²⁴ *Ibid, h. 110*

²⁵ *Ibid, h.10*

keliru tadi. Bila uang di kembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja. Tidak akan ada sektor non riil (dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, pasar modal dan sebagainya). Kalaupun ada sektor keuangan, itu tidak lebih sekedar menyediakan uang untuk modal usaha yang diatur dengan sistem yang benar (misalnya bagi hasil). Dengan cara itu, sistem ekonomi yang bertumpu pada sektor riil akan berjalan dengan mantap. Tidak mudah bergoyang atau digoyang seperti saat ini.²⁶ Disamping kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang berbeda dengan konvensional, menurut Umer Chapra juga menambahkan bahwa untuk menekan inflasi harus ada stabilitas harga. Hal ini sebagai mana di kemulkakan oleh Umer Chapra bahwa alternatif kebijaksanaan yang paling baik dan sesuai dengan norma keadilan sosio-ekonomi yang di tekankan oleh syariah adalah stabilisasi harga²⁷

Menurut Umer Chapra strategi untuk menekan inflasi yaitu:

Pertama, perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga dimensi spritual). Kedua, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Ketiga, penghapusan riba.

1. Perbaikan moral

Elemen paling penting dari strategi Islam dalam merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Tanpa peningkatan spirit semacam itu tidak akan ada satu tujuan pun yang dapat direalisasikan dalam kesejahteraan manusia yang sesungguhnya jadi sulit diwujudkan.

Hal ini membawa pada inti konsep kesejahteraan dalam Islam. Kesejahteraan manusia hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spritual manusia dan tidak satupun yang dapat diabaikan. Jika Islam mendorong manusia agar menguasai alam dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan manusia, Islam juga mengingatkan agar mereka tidak hanya terpaku pada satu hal, menganggap pemenuhan materi sebagai tolok ukur tertinggi dari prestasi manusia, karena hal ini justru menjuruskan mereka untuk melupakan nilai spritual manusia itu sendiri. Islam menganggap kehidupan material dan kehidupan spritual sebagai satu kesatuan yang dapat saling mengiatkan dan secara bersama-sama sebagai landasan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang sesungguhnya.

2. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

Islam telah memberikan satu cetak biru untuk pengorganisasian seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial atau politik, yang memperkuat keberanian masyarakat untuk mengatakan yang benar dan mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang sangat

²⁶ *Ibid*, h.12

²⁷ M. Umer Chapra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.12

dekat dengan Islam. Misalnya, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh semua sistem ekonomi, tidak akan bisa dicapai tanpa: keyakinan mengenai persaudaraan manusia yang hanya bermakna bagi mereka yang percaya akan Tuhan yang Esa yang menciptakan semua umat manusia, yang dihadapanNya semua manusia sama dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sistem sosioekonomi yang tidak menciptakan sikap sosial berdasarkan hukum survival Darwin, melainkan mengorganisasikan masyarakat atas landasan moral untuk mendorong interaksi sosioekonomi atas dasar keadilan dan kerja sama. Sistem sosiopolitik yang mampu mencegah perlakuan tidak adil dan eksploitatif melalui berbagai cara, termasuk mencegah riba, dan memberikan dukungan material bagi yang lemah,

3. Penghapusan riba

Strategi dalam perekonomian Islam amat diperlukan permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Permintaan uang pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dalam ekonomi Islam tidak saja meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga tetapi dapat memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang, hal ini akan lebih jauh diperkuat karena aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam sehingga orang yang hanya memegang dana likuid akan menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan resiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk cash tanpa memperoleh keuntungan atau turut berbagi resiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan. Dalam ekonomi Islam laju keuntungan berbeda-beda dan laju suku bunga tidak akan di temukan di depan. Satu-satunya yang akan ditemukan didepan adalah rasio bagi hasil. Rasio bagihasil tidak akan mengalami fluktuasi seperti halnya suku bunga karena ia akan didasarkan pada konversi ekonomi dan sosial dan setiap ada perubahan didalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama. Jika prospek ekonomi cerah keuntungan secara otomatis akan meningkat.

Diantara elemen utama dari strategi bagi pembaharuan sistem keuangan dan perbankan (misalnya, penghapusan riba dan berbagi untung dan rugi) telah dituturkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagian-bagian strategi yang disarankan Al-Quran dan Sunnah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Meskipun demikian, pengujian atas elemen-elemen lain akan berupa dukungan yang mereka berikan terhadap keseluruhan strategi syariah dan sumbangan yang mereka berikan untuk merealisasikan tujuan.

Semakin kuat dukungan yang diberikan dan semakin besar sumbangan yang diberikan untuk mencapai tujuan akhir, semakin dikehendaki pula elemen-elemen strategi yang diberikan oleh manusia dengan catatan bahwa hal itu semua tidak bertentangan dengan syariah. Elemen-elemen yang terakhir ini, sudah barang

tentu, tidak dapat sekali jadi melainkan perlu diperbaiki dan disempurnakan secara berkelanjutan melalui proses evolusi.²⁸

Seluruh fuqaha sepakat bahwa hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Pernyataan Al-Quran tentang larangan riba terdapat dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 275.

Ayat tersebut mengecam keras pemungutan riba dan mereka disamakan dengan orang yang kerasukan syetan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada Al-Quran surah al-Baqarah ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada Al-Quran surah al-Baqarah ayat 278.

Pelarangan riba dalam ayat 276 Q.S. Al-Baqarah memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Selain itu maksud dari penghentian riba adalah untuk tidak berbuat dhalim kepada orang lain sehingga tidak ada seorang pun yang terdhalimi (eksploitasi, menindas, memeras dan menganiaya).

Selain yang disebutkan diatas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba di akhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kabajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan ayat 136. Disana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan bagian pertanda orang yang bertakwa.

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam –meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam²⁹. Menurut Ahmad Rofiq riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangan pun dilakukan secara bertahap, karena sudah menjadi kebiasaan yang telah mendarah daging.³⁰

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang riba. Ahli-ahli filsafat seperti plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka

²⁸ *Ibid*

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 37

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Putra Mediatama Press), 2004, h. 37

menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.³¹

Menurut Mahmud Yunus, orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan atau syetan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.³² Karena itu menurut Hamka, riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan diatas penderitaan orang lain.³³

Islam beserta semua syariat samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si paminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba.

Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mangambil keuntungan sedikitpun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persau daaraan, tolong-menolong dan bergotong-royong diantara sesama manusia.

4. Penutup

Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian mempunyai cara dan strategi tersendiri dalam menekan inflasi yang jauh berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam menyetujui kebijakan moneter dan fiskal sebagai bagian dan upaya menekan inflasi. Akan tetapi untuk mencapai norma keadilan sosioekonomi perlu ada upaya untuk menjaga stabilitas harga, melalui strategi perbaikan moral, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta penghapusan riba.

³¹ M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 1992), h.120

³² Mahmud Yunus, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Jakarta PT. Hidakarya Agung, 1978), h. 64

³³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2003), h. 97

Referensi

- A Aam Slamet Rusydiana, *Jurnal Kordinat*, vol 11 No.1, Jakarta, 2009
- Al-Qardawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press. 1995
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, Jakarta: Khalifa Antonio, Syafii. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut. 1999
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinaka Cipta. 2008
- Budiono, *Ekonomi Internasional*. BPFE, Yogyakarta: BPFE. 1994
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: GIP dan Tazkia. 2002
- _____, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1997
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas. 2003
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana. 2008
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani. 2006
- Karim, M. Rusli. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1992
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1997
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana. 2006
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press. 2004
- Soemanto, Wasty. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara. 1999
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 2000.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 1997
- Tajul, Khalwaty, *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2000
- Yunus, Mahmud. *Tafsir al-Quran al-Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1978